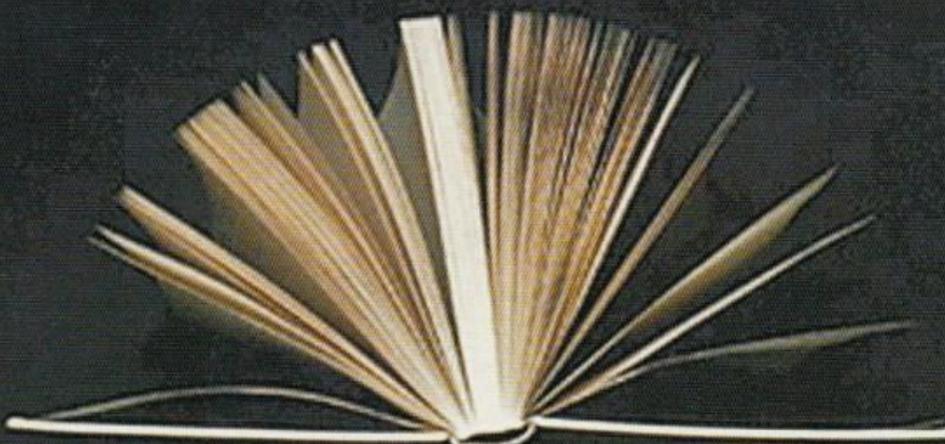


HANS KELSEN

# TEORI HUKUM MURNI

DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF



## DAFTAR ISI

### I. HUKUM DAN ALAM ~ 1

1. TEORI "MURNI" ~ 1
2. PERBUATAN DAN MAKNA HUKUMNYA ~ 2
3. MAKNA SUBYEKTIF DAN OBYEKTIIF SUATU PERBUATAN: PENAFSIRAN-DIRINYA ~ 3
4. NORMA ~ 4
  - a) Norma sebagai Skema Penafsiran ~ 4
  - b) Norma dan Penciptaan Norma ~ 5
  - c) Keabsahan dan Lingkup Keabsahan Norma ~ 11
  - d) Peraturan Positif dan Negatif: Memerintahkan, Mewenangkan, Mengizinkan ~ 17
  - e) Norma dan Nilai ~ 19
5. TATANAN SOSIAL ~ 27
  - a) Tatanan Sosial yang Menetapkan Sanksi ~ 27
  - b) Adakah Tatanan Sosial tanpa Sanksi? ~ 30
  - c) Sanksi Transendental dan Imanen secara Sosial ~ 31
6. TATANAN HUKUM ~ 34
  - a) Hukum: Sebuah Tata Perilaku Manusia ~ 34
  - b) Hukum: Sebuah Tatanan Pemaksa ~ 37
    - Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai sanksi ~ 39
    - Monopoli pemaksaan dari komunitas hukum ~ 40
    - Tatanan hukum dan keamanan kolektif ~ 42
    - Tindakan paksa selain dari sanksi ~ 45
    - Tingkat minimum kebebasan ~ 47
  - c) Hukum Sebagai Tatanan Pemaksa Normatif; Komunitas Hukum dan Geng Perampok ~ 49
  - d) Kewajiban Hukum tanpa Sanksi? ~ 56
  - e) Norma Hukum Terikat ~ 61

### II. HUKUM DAN MORAL ~ 67

7. NORMA MORAL SEBAGAI NORMA SOSIAL ~ 67
8. MORAL SEBAGAI PENGATUR PERILAKU INTERNAL ~ 68
9. MORAL, SEBUAH TATANAN POSITIF TANPA-PAKSAAN ~ 70
10. HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI MORAL ~ 71

11. RELATIVITAS NILAI MORAL ~ 72
12. PEMISAHAN ANTARA TATANAN HUKUM DAN MORAL ~ 75
13. PEMBENARAN HUKUM MELALUI MORAL ~ 77
<b>III. HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN ~ 80</b>
14. NORMA HUKUM SEBAGAI OBYEK ILMU HUKUM ~ 80
15. TEORI HUKUM STATIS DAN DINAMIS ~ 80
16. NORMA HUKUM DAN ATURAN HUKUM ~ 81
17. ILMU SEBAB-AKIBAT DAN ILMU NORMA ~ 85
18. KAUSALITAS DAN IMPUTASI ~ 87
HUKUM ALAM DAN HUKUM PERUNDANGAN ~ 87
19. PRINSIP IMPUTASI DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT PRIMITIF ~ 93
20. ASAL-MUASAL PRINSIP KAUSALITAS DALAM PRINSIP RETRIBUSI ~ 96
21. ILMU SOSIAL KAUSAL DAN NORMATIF ~ 97
22. PERBEDAAN ANTARA PRINSIP KAUSALITAS DAN IMPUTASI ~ 102
23. PERSOALAN KEBEBASAN KEHENDAK ~ 104
24. FAKTA-FAKTA YANG SELAIN DARI PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MUATAN NORMA SOSIAL ~ 113
25. NORMA KATEGORIS ~ 114
26. PENOLAKAN ATAS YANG SEHARUSNYA; HUKUM SEBAGAI IDEOLOGI ~ 115
<b>IV. ASPEK STATIS HUKUM ~ 123</b>
27. SANKSI ~ 123
a) Sanksi Hukum Nasional dan Internasional ~ 123
b) Pelanggaran (Kesalahan) bukanlah Negasi, melainkan Kondisi Hukum ~ 126
28. KEWAJIBAN HUKUM ~ 131
a) Kewajiban dan Sanksi Hukum ~ 131
b) Kewajiban dan "Keharusan" Hukum ~ 134
c) Pertanggungjawaban ~ 136
d) Pertanggungjawaban Individual dan Kolektif ~ 138
e) Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan dan Pertanggungjawaban Absolut ~ 139
f) Kewajiban Mengganti Kerugian atau Perbaikan ~ 140
g) Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut ~ 142
29) HUKUM DALAM PENGERTIAN SUBYEKTIF: HAK DAN OTORISASI ~ 143
a) Hak dan Kewajiban ~ 143
b) Jus ad rem dan Jus in personam ~ 148
c) "Hak" sebagai Kepentingan yang Dilindungi Hukum ~ 151
d) "Hak" sebagai Kekuatan Hukum ~ 152
e) "Hak" sebagai Izin Positif ~ 156

f) Hak Politik ~ 157	
30. KAPASITAS UNTUK BERTINDAK; KOMPETENSI: KONSEP "ORGAN" ~ 165	
a) Kapasitas untuk Bertindak ( <i>Handlungsfähigkeit</i> ) ~ 165	
b) Kompetensi ~ 168	
c) Konsep "Organ" ~ 170	
31. REPRESENTASI KAPASITAS HUKUM (RECHTSFÄHIGKEIT) ~ 179	
32. RELASI HUKUM ~ 185	
33. SUBYEK HUKUM; ORANG ~ 190	
a) Subyek Hukum ~ 190	
b) Orang ( <i>Person</i> ) secara Fisik ~ 193	
c) Badan Hukum ~ 196	
d) Badan Hukum sebagai Subyek yang Bertindak ~ 198	
e) Badan Hukum sebagai Subyek dari Kewajiban dan Hak ~ 200	
Kewajiban bagi badan hukum ~ 202	
Pertanggungjawaban badan hukum ~ 208	
Hak badan hukum ~ 210	
f) Badan Hukum sebagai Konsep Pelengkap Ilmu Hukum ~ 213	
g) Penghapusan Dualisme Hak dan Kewajiban ~ 214	
V. ASPEK DINAMIS HUKUM ~ 216	
34. ALASAN KEABSAHAN TATANAN NORMA: NORMA DASAR ~ 216	
a) Makna Pencarian Alasan Keabsahan ~ 216	
b) Prinsip Statis dan Dinamis ~ 218	
c) Alasan bagi Keabsahan Tatanan Hukum ~ 222	
d) Norma Dasar sebagai Pengandaian Transenden-logis ~ 225	
e) Kesatuan Logis dari Tatanan Hukum; Konflik Norma ~ 229	
f) Legitimasi dan Keefektifan ~ 230	
g) Keabsahan dan Keefektifan ~ 233	
h) Norma Dasar Hukum Internasional ~ 236	
i) Teori Norma Dasar dan Teori Hukum Alam ~ 239	
j) Norma Dasar Hukum Alam ~ 242	
35. STRUKTUR HIERARKIS TATANAN HUKUM ~ 243	
a) Konstitusi ~ 243	
b) Legislasi dan Tradisi ~ 247	
c) Undang-undang dan Peraturan ~ 252	
d) Hukum Materiil dan Formil ~ 253	
e) Yang Dinamakan Sumber Hukum ~ 256	
f) Penciptaan, Penerapan, dan Ketaatan terhadap Hukum ~ 257	
g) Jurisdiksi ~ 260	
Karakter konstitusi dari keputusan hukum ~ 260	
Hubungan antara keputusan pengadilan dan norma hukum umum yang harus diterapkan ~ 266	

Celah-celah dalam hukum ~ 270  
Penciptaan norma hukum umum oleh pengadilan; fleksibilitas hukum dan kepastian hukum ~ 275

- h) Transaksi Hukum ~ 282
  - Transaksi hukum sebagai fakta pencipta hukum ~ 282
  - Kontrak ~ 284
- i) Administrasi ~ 289
- j) Konflik antara Norma dari Beragam Tingkatan ~ 294
  - Keputusan pengadilan yang "tidak absah" ~ 294
  - Undang-undang yang "inkonstitusional" ~ 299
- k) Kebatalan (*Nullity*) dan Keterbatalan (*Annulability*) ~ 305

## VI. HUKUM DAN NEGARA ~ 308

- 36. PENCIPTAAN HUKUM DAN BENTUK PEMERINTAHAN ~ 308
- 37. HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIBADI ~ 309
- 38. KARAKTER IDEOLOGIS DUALISME HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT ~ 311
- 39. DUALISME TRADISIONAL ANTARA NEGARA DAN HUKUM ~ 314
- 40. FUNGSI IDEOLOGIS DUALISME NEGARA DAN HUKUM ~ 315
- 41. KEIDENTIKAN NEGARA DAN HUKUM ~ 316
  - a) Negara sebagai Tatatan Hukum ~ 316
  - b) Negara sebagai Badan Hukum ~ 320
    - Negara sebagai subyek pelaku; organ negara ~ 321
    - Keterwakilan ~ 330
    - Negara sebagai subyek kewajiban dan hak ~ 334
  - c) Kewajiban Diri negara; Negara yang Diatur oleh Hukum (*Rechtsstaat*) ~ 345
  - d) Sentralisasi dan Desentralisasi ~ 346
  - e) Penghapusan Dualisme Hukum dan Negara ~ 351

## VII. NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL ~ 353

- 42. ESENSI HUKUM INTERNASIONAL ~ 353
  - a) Sifat Legal Hukum Internasional ~ 353
  - b) Hukum Internasional merupakan Tatatan Hukum Primitif ~ 356
  - c) Hierarki Hukum Internasional ~ 357
  - d) Pewajiban dan Pewenangan tak langsung melalui Hukum Internasional ~ 358
- 43. HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL ~ 362
  - a) Kesatuan Hukum Internasional dan Nasional ~ 362
  - b) Tidak ada Konflik antara Hukum Internasional dan Nasional ~ 364
  - c) Hubungan Timbal-balik antara Dua Sistem Norma ~ 366
  - d) Konstruksi Monistik Merupakan Keniscayaan ~ 368

44. TEORI HUKUM DAN PANDANGAN DUNIA ~ 380	
VIII. PENAFSIRAN ~ 384	
45. SIFAT PENAFSIRAN ~ 384	
a) Ketidaktentuan Relatif dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 385	
b) Ketidaktentuan Tersengaja dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 386	
c) Ketidaktentuan Tak Sengaja dari Tindak Penegakan-Hukum ~ 386	
d) Hukum yang Harus Diterapkan Merupakan sebuah Kerangka ~ 387	
e) Metode Penafsiran ~ 388	
46. PENAFSIRAN SEBAGAI TINDAKAN PEMAHAMAN ATAU KEHENDAK ~ 390	
47. PENAFSIRAN OLEH ILMU HUKUM ~ 392	
CATATAN ~ 395	
INDEX ~ 403	